

## PENGARUH DESENTRALISASI TERHADAP MASUKNYA INVESTASI PADA 32 PROVINSI DI INDONESIA

Kiki Meliza<sup>a</sup>, Robert A.Simanjuntak<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Indonesia E-mail: kikimeliza@gmail.com

<sup>b</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Email: rob\_7762@yahoo.co.uk

### ABSTRAK

*One of the seminal issue for countries is how to manage fiscal decentralization across levels of government. When decentralization is not managed optimally, it undermines government ability to manage local economic including to obtain both foreign and domestic investments. Therefore, this research attempted to discuss the impact of decentralization on investment inflows and to discuss factors influence it. This research uses Indonesia as a case study regarding the effect of decentralization on investment inflows by using a panel data with a random effect model from 2010 up to 2016 periods at 32 Provinces. The results show that the decentralization has a negative and significant impact on investment inflows. The proxy shared total provincial government expenditure against the total Central Government expenditures showed for every 1% increase in the share of local government expenditures toward the central government will reduce 0,38% investment values. The findings also found some factors like the electric power consumption per capita, the density of road, the local incentives regulation on investment, and market size drove investment inflows into a region. Other factors contributed to the investment inflows resulted from the qualitative data were the location of a province and the existence of the industrial area.*

Salah satu isu utama pada beberapa negara adalah bagaimana mengelola desentralisasi fiskal pada seluruh tingkat pemerintahan. Ketika desentralisasi fiskal tidak dapat dikelola secara optimal, maka dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah termasuk salah satunya untuk mendapatkan aliran investasi baik asing maupun domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membahas dampak desentralisasi pada arus masuk investasi dan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data panel dengan fixed effect model pada periode tahunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk 32 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap masuknya investasi. Dengan menggunakan proxy share total belanja pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan share belanja pemerintah daerah terhadap pusat sebesar 1% akan menurunkan nilai investasi sebesar 0.38% dalam suatu provinsi. Selain itu variabel perda insentif investasi, konsumsi listrik per kapita, panjang jalan dan ukuran pasar akan mendorong masuknya investasi ke suatu daerah. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada arus masuk investasi berdasarkan dari penelitian kualitatif adalah lokasi sebuah provinsi dan keberadaan kawasan industri.

Keywords : Capital Expenditure, Decentralization, Investment, Foreign Direct Investment, Panel data,  
JEL Classification : H54, H7, E22, F21, C33

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif dilaksanakan semenjak tahun 2001 telah mengubah tata kelola keuangan publik di Indonesia. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan adanya Undang-undang ini telah mengubah paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan pada

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan provinsi dan keanekaragaman daerah.

Perubahan mendasar terjadi pada sistem pemerintahan yang dianut sebelumnya sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Implementasi terhadap peraturan ini tidak berjalan sempurna sehingga pada tahun 2004 peraturan ini direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dan terakhir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

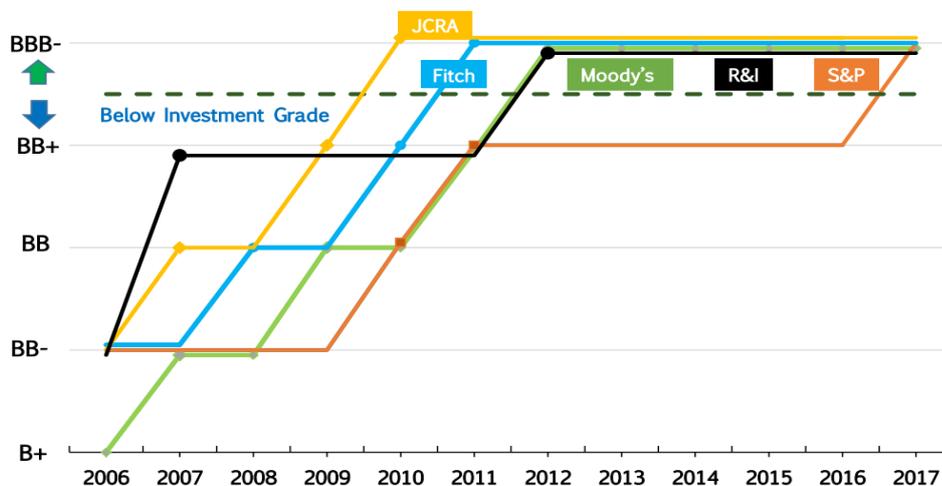
Salah satu instrumen pendanaan program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN. Instrumen fiskal sebagai salah satu pendukung desentralisasi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Selain ketiga dana perimbangan dalam rangka desentralisasi fiskal di atas, Pemerintah juga mengalokasikan belanja dalam rangka azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat langsung ke daerah tanpa melalui APBD. Esensi dari desentralisasi fiskal adalah adanya kewenangan (diskresi) atau pun keleluasaan daerah mengalokasikan anggarannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerahnya. Dua instrumen penting dalam konteks desentralisasi fiskal adalah kewenangan memungut pajak (*taxing power*) dan transfer daerah.

Penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah pusat membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangannya. Jika dikaitkan dengan investasi daerah, terdapat penganggaran biaya investasi dalam komponen masing-masing daerah yang ditujukan bagi pembangunan ekonomi daerah. Biaya investasi yang disebut belanja modal menurut He dan Sun (2014) menjadi faktor penarik investasi asing masuk ke Indonesia.

Sepanjang tahun 2017 kinerja perekonomian Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 5,07 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen. Kenaikan pertumbuhan tersebut bersumber dari kinerja investasi dan ekspor yang membaik. Program akselerasi infrastruktur dan berbagai upaya perbaikan daya saing nasional turut mendorong pertumbuhan Investasi mencapai sebesar 6,15 persen, yang merupakan realisasi pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya pergeseran ke arah struktur pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif. Pertumbuhan investasi juga didukung oleh terus meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang tumbuh rata-rata 14,4 persen selama lima tahun terakhir.

*Foreign Direct Investment* merupakan salah satu kunci utama untuk meraih pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pergerakan positif dari pertumbuhan FDI dan Penanaman Modal Asing menjadi indikasi pentingnya peran FDI dalam mendorong pertumbuhan investasi dalam struktur ekonomi Indonesia. FDI masih mendominasi realisasi penanaman modal di Indonesia sepanjang 2017. Sekitar 62,42% realisasi investasi di tanah air berasal dari luar negeri. Laju inflasi yang terkendali, ekonomi yang tumbuh sekitar 5%, serta stabilnya nilai tukar rupiah menjadi daya tarik investor asing (Jawa Pos:2017).

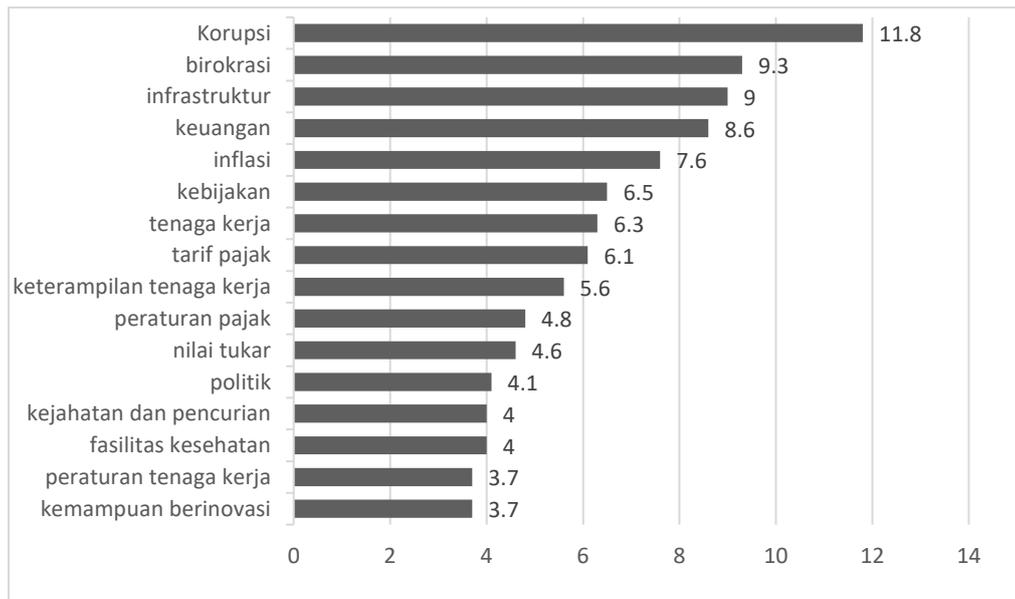
Terkait dengan iklim investasi, Indonesia dinilai sebagai negara yang aman, stabil dan reformis dari berbagai negara peringkat dunia (*International Credit Rating Agency*) seperti S&P Global yang memberikan peringkat BBB-(*stable*), Moody's yang memberikan peringkat Baa3(*positive*), Fitch Ratings yang memberikan peringkat BBB-(*positive*), R&I yang memberikan peringkat BBB- serta JCRA yang memberikan peringkat BBB- (*positive*). Rating BBB- yang menjadikan Indonesia negara layak investasi tidak serta merta didapatkan begitu saja oleh Indonesia. Berdasarkan data dari BKPM, peringkat Indonesia dimulai dari BB- di tahun 2006, cenderung stagnan hingga 2009 dan mulai naik menjadi BB+ di tahun 2010 seperti yang ditampilkan pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 Peringkat Investasi Indonesia berdasarkan Penilaian dari Lembaga Pemeringkat Internasional (*International Credit Rating Agency*) Tahun 2006-2017  
Sumber: BKPM: Iklim Investasi Indonesia ,2017

Selanjutnya, berdasarkan laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2016-2017, *World Economic Forum* menempatkan daya saing Indonesia berada di peringkat 41 atau turun empat peringkat dibanding posisi tahun lalu yang berada di urutan 37. Berdasarkan laporan WEF tersebut, masalah korupsi yang tinggi, birokrasi pemerintah yang dianggap tidak efisien, infrastruktur yang minim menjadi 3 masalah teratas yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Adapun hasil survey *World Economic Forum* mengenai masalah utama yang dihadapi pelaku usaha/investor di Indonesia dijabarkan pada grafik 1.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dibutuhkan koordinasi dan upaya yang sama dari pemerintah daerah untuk melakukan upaya serupa karena eksekusi penanaman modal sebagian besar berada di daerah. Iklim usaha yang kondusif akan menjadi tolok ukur dalam melihat kemampuan dan kesiapan suatu daerah guna mengambil manfaat dan peluang dalam investasi. Investasi akan masuk ke suatu daerah apabila daerah tersebut memiliki daya tarik investasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menciptakan suatu lingkungan usaha yang ramah terhadap investor asing baik berupa kemudahan regulasi, debirokratisasi, penyediaan infrastruktur, aturan yang jelas dan sektor unggulan yang layak untuk ditawarkan kepada investor yang berminat.



Grafik 1 Hasil Survey WEF 2016-2017: Masalah Utama dalam berusaha  
 Sumber: *World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2016*

Pada Pelaksanaan Proses perizinan di daerah lebih spesifik dilakukan sesuai dengan sektor investasi seperti properti, industri, ketahanan pangan, pariwisata dan lain-lain. Izin yang harus dikantongi calon investor berupa izin gangguan, izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, dan izin-izin spesifik lainnya sesuai sektor investasinya. Terlalu banyaknya izin yang harus dikantongi investor di daerah dan biaya pengurusan yang harus dilakukan menjadi kendala investasi selama ini. Walaupun pada tahap awal investor telah memangkas waktu izin prinsip menjadi 3 jam di BKPM, namun pengurusan izin di daerah dapat memakan waktu yang lebih lama. Lamanya durasi perizinan juga diikuti dengan adanya pungutan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah sesuai peraturan daerah masing-masing. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk menetapkan retribusi dan pajak daerah disatu sisi menjadi sumber pendapatan asli daerah namun disisi lain menjadi disinsentif bagi iklim investasi.

Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN disuatu provinsi tidak terlepas dari upaya pemerintah daerahnya dalam mengelola APBD dan seberapa besar porsi belanja pemerintah yang dikeluarkan sebagai belanja modal. Belanja modal merupakan investasi yang dilakukan pemerintah daerah yang dapat diwujudkan kedalam belanja infrastruktur guna memajukan daerahnya. Dengan porsi belanja modal yang lebih besar, diharapkan dibangunnya sarana pendukung bagi penciptaan lapangan usaha di daerah seperti sarana jalan, listrik, air, dan jalur pengangkut

lainnya. Faktor jalan dan elektrifikasi menjadi hal yang penting dibangun dalam suatu daerah. Dengan adanya jalan, akan tercipta distribusi baik barang maupun jasa dengan lebih baik. Hal ini dibutuhkan bagi suatu usaha untuk memperlancar distribusi bahan baku dan hasil produksi. Listrik pun tak kalah pentingnya apalagi bagi industri yang membutuhkan listrik untuk menggerakkan produksinya.

Berdasarkan data dari Bank Dunia (2009), Belanja modal pemerintah daerah tidak lebih dari 0,7% PDRB dari masing-masing daerah selama kurun waktu 1997-2009. Sementara dengan terkait pembangunan infrastruktur masih sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat dimana anggaran tersebut terpusat pada Kementerian Lembaga. Mayoritas pembangunan infrastruktur di daerah dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana otonomi khusus bagi Aceh dan Papua (Mahi, 2017)

Dengan adanya sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia semenjak tahun 2001 setiap pemerintahan daerah diberikan wewenang mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri baik secara pelimpahan kewenangan secara devolusi maupun desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal setiap daerah berhak untuk mengelola anggaran belanja rumah tangga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Apakah anggaran belanja dibelanjakan hanya untuk membiayai belanja pegawai atau digunakan untuk modal. Namun umumnya yang terjadi hingga saat ini, porsi belanja pemerintah daerah masih belum seimbang dimana masih besarnya belanja untuk pegawai dibandingkan belanja modal. Desentralisasi fiskal memiliki peluang untuk meningkatkan kesenjangan antar daerah. Dengan keragaman sumberdaya yang dimiliki, suatu daerah yang kaya akan semakin cepat tumbuh dan berkembang sedangkan daerah yang miskin sumberdaya semakin tertinggal (Dartanto dan Brojonegoro, 2003).

Pada tahun 2016 telah menghapus 3.143 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Sejumlah aturan yang dibatalkan meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Kemudian sejumlah perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, perda yang menghambat kemudahan usaha dan perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Aturan ini dinilai menghambat kapasitas nasional dan menghambat kecepatan Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

Beberapa hal yang menjadi penyebab tersendatnya investasi adalah ketersediaan lahan industri, infrastruktur, peraturan daerah yang mempersulit, dan persoalan izin lingkungan sebagai pengganjal investasi (kompas, 2017). Selanjutnya, masih beragamnya perda-perda perizinan di kabupaten/kota yang dapat menghambat proses Izin-izin Usaha Industri dan adanya hambatan investasi karena penegakan hukum yang tidak proporsional atas izin-izin usaha pada industri menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah. (Lakip BPMD Jateng, 2016)

Upaya meningkatkan investasi hanya dapat tercapai ketika faktor penghambat investasi dapat diatasi. Paradigma yang berkembang pada masa otonomi daerah dimana Pemda harus berinovasi dan berkreasi menggali pendapatan untuk menjalankan pemerintahannya perlu diperbaiki. Paradigma daerah dianggap berhasil menjalankan otonomi daerah apabila Pendapatan asli daerah yang diterima meningkat. Target PAD sering memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif terhadap iklim usaha dan investasi. Padahal iklim investasi yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kondisi yang terjadi saat ini adalah pemerintah belum mampu memberikan jaminan keamanan

berusaha bagi investor dan para pionir yang mengembangkan usaha di daerah. Hal yang menghambat investasi biasanya terkait dengan kepastian hukum dan jaminan keamanan, kondisi infrastruktur pendukung, serta birokrasi yang sederhana, cepat dan transparan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan research gap dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh He Canfei (2006) yang menyatakan bahwa provinsi yang memiliki otoritas yang lebih dalam masalah ekonomi dan pengetatan keterbatasan anggaran fiskal memiliki FDI yang lebih besar. Desentralisasi secara signifikan meningkatkan lingkungan investasi dan menarik investasi asing sementara intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi dapat menghambat investasi asing. Sementara pendapat berbeda diungkapkan oleh Kalamova (2009) yang menyatakan bahwa tingkat desentralisasi di negara penerima investasi memiliki dampak negatif terhadap FDI. Hasil penelitian itu mengindikasikan bahwa ternyata terdapat permasalahan berupa tingginya pajak setempat, birokrasi yang sulit, dan penyediaan regulasi pemerintah di dalamnya.

Adapun jurnal yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh He Canfei (2006). Perbedaan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel baru yaitu variabel belanja modal dan perda insentif investasi di daerah. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas penelitian ingin melihat pengaruh penerapan desentralisasi fiskal pada 32 provinsi di Indonesia terhadap masuknya investasi pada daerah tersebut. Apakah dengan adanya wewenang daerah dalam mengelola APBD nya sendiri dapat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah sehingga dapat mendorong masuknya investasi serta dengan adanya kewenangan dalam menciptakan regulasi apakah regulasi tersebut menjadi penghambat atau pendorong investasi di daerah. Terakhir, untuk menilai apakah reformasi kemudahan berusaha yang tengah dilakukan pemerintah telah berjalan dengan baik.

Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh desentralisasi terhadap masuknya investasi PMA dan PMDN di Indonesia, untuk membandingkan apakah insentif fiskal dan pemberian fasilitas penanaman modal berpengaruh terhadap masuknya investasi ke provinsi tersebut, dan serta untuk menganalisis langkah-langkah yang tengah diambil pemerintah terkait reformasi kemudahan berusaha di Indonesia

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sementara itu, menurut Rondinelli & Cheema (1983 : 18): dari sudut pandang kebijakan dan administrasi mengemukakan bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, atau meningkatkan sumber daya dan alokasi dari pemerintah pusat dan organisasinya kepada unit dari Kementerian atau badan, unit-unit dibawahnya atau atau tingkatan pemerintah administratif lokal, organisasi semi otonom, pemerintahan lokal, atau organisasi non pemerintah. (Rondinelli, 1983).

Sementara itu, investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*suistanable development*), atau pertumbuhan

ekonomi jangka panjang. Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja serta kemajuan teknologi. Ketiga faktor di atas menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

Dalam model Solow ini, pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan secara eksogen, atau dengan kata lain ditentukan di luar model. Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan *steady-state* yang bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Dalam hal ini, kondisi *steady-state* menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang (Mankiw, 2007). Ketimpangan antar daerah yang terjadi saat ini dapat diatasi dengan investasi. Menurut teori Solow, dengan adanya akumulasi modal, sumberdaya manusia dan teknologi melalui investasi maka daerah yang lebih tertinggal akan mengejar pertumbuhan atau konvergen.

Pada penelitian ini proksi yang digunakan terhadap desentralisasi fiskal adalah proporsi total belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat. Derajat desentralisasi fiskal tersebut berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas yang penuh terhadap pengelolaan anggaran belanjanya, semakin tinggi rasio nya maka makin besar derajat desentralisasinya. Standar pengukuran derajat desentralisasi ini berdasarkan tulisan yang ditulis oleh He canfei (2006) dan Zhang & Zou (1998). Insentif fiskal yang besar dapat membuat pemerintah daerah mampu menciptakan lingkungan yang ramah bagi investasi. Hasil yang diharapkan adalah positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan investasi.

Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi adalah melalui belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah. Belanja modal digunakan untuk membangun sesuatu yang bersifat produktif seperti tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dianggap sebagai investasi bagi daerah untuk dapat menarik investasi secara tidak langsung.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor.

Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa studi literatur yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dalam dan luar negeri, berikut matrik dari beberapa penelitian yang mendukung.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu  
Sumber: Analisis Penulis, 2018

No	Metode	Kesimpulan
<b>Variabel desentralisasi fiskal (Fdec)</b>		
1	He Canfei (2006). "Regional Decentralisation and Location of Foreign Direct Investment in China" dari He Canfei (2006).	<i>Fixed Effect Model</i> Desentralisasi secara signifikan meningkatkan lingkungan investasi dan menarik investasi asing sementara intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi dapat menghambat investasi asing.
2	Qichun He dan Meng Sun. (2014) "Does fiscal decentralization promote the inflow of FDI in China"	<i>LSDV (Least squares dummy variables) regression and system GMM (Generalized method of moments).</i> pertumbuhan ekonomi dan konsumsi atau infrastruktur publik yang kemudian mendorong penerimaan FDI di China. Tingginya pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur semakin menarik banyaknya FDI yang masuk ke daerah.
<b>Variabel FDI</b>		
3	Carkovic dan Levine (2002) dalam jurnal "Does foreign direct investment accelerate economic growth?"	<i>Ordinary least square and dynamic panel model</i> Alasan ekonomi untuk menawarkan insentif khusus untuk menarik FDI berasal dari keyakinan bahwa investasi asing akan menghasilkan eksternalitas dalam bentuk transfer teknologi dan <i>spillovers</i> . Pengeluaran publik di sisi lain merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengendalikan ekonomi. Belanja publik dapat mempengaruhi pertumbuhan dengan menyediakan infrastruktur yang paling dibutuhkan sebagai prasyarat untuk pembangunan ekonomi.
<b>Hubungan FDI dan Desentralisasi</b>		
4	Kalomova (2009) "Foreign Direct Investment and Decentralization"	<i>Tobit regression</i> tingkat desentralisasi di negara penerima investasi memiliki dampak negatif terhadap FDI. Masalah yang lebih penting bagi keberhasilan investasi adalah struktur pemerintahan dan kualitas kebijakan dan birokrasinya pada tingkat hierarki yang berbeda yang bertanggung jawab untuk lokasi investasi tertentu

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan model ekonometrik yang meliputi pengujian secara teori ekonomi, lalu pengujian secara statistik dimana setiap variabel bebas dapat menjelaskan variabel tidak bebasnya secara signifikan sehingga model yang terbentuk dapat digunakan untuk mengestimasi, dan secara ekonometrik dimana model yang terbentuk tidak melanggar asumsi klasik atau model tersebut dapat dikatakan sebagai estimator yang tak bias.

Model yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh He Canfei (2006) dalam Jurnal "*Post-Communist Economies Volume 18, 2006- Regional Decentralisation and Location of Foreign Direct Investment in China*".

$$\text{LOG(Invest)}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG(FDEC)}_{it} + \beta_2 \text{LOG(MODAL)}_{it} + \beta_3 \text{LOG(LISTRİK)}_{it} + \beta_4 \text{LOG(JALAN)}_{it} + \beta_5 \text{LOG(Marketsize)}_{it} + \beta_6 \text{LOG(UMPriil)}_{it} + \beta_7 \text{LOG(Hcap)}_{it} + \beta_8 \text{Perinvest}_{it} + u_i \dots (1)$$

Dimana:

LOG(INVEST)	: log investasi provinsi i tahun t, yaitu rasio jumlah penerimaan nominal FDI/PMA ditambah DDI/PMDN dibagi PDRB provinsi
LOG(FDEC)	: indeks desentralisasi fiskal provinsi i tahun t
LOG(MODAL)	: rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja daerah pada provinsi i tahun t
LOG(JALAN)	: rasio kepadatan jalan provinsi i tahun t
LOG(LISTRİK)	: konsumsi listrik per kapita provinsi i tahun t
Perinvest	: Perda Investasi
LOG(UMPriil)	: Gaji pekerja riil provinsi i tahun t
LOG(HCAP)	: persentase illiterasi dan semi illiterasi provinsi i tahun t
LOG( <i>Marketsize</i> )	: ukuran pasar provinsi i tahun t

Data yang diteliti merupakan data panel, yaitu gabungan antara data runtun waktu dan lintas daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai sumber data dapat dilihat pada Tabel 2

**Tabel 2 Jenis dan Sumber data**

Sumber: Analisis Penulis, 2018

No	Variabel	Defenisi operasional	Sumber
1	Log(Investasi)	Rasio Jumlah penerimaan investasi Merupakan data realisasi penerimaan investasi PMA dan PMDN yang diterima BKPM berdasarkan lokasi proyek berada di suatu provinsi tahun 2010-2016 dibagi dengan PDRB provinsi	BKPM tahun 2010-2016 BPS
2	Log(FDEC)	Desentralisasi Fiskal	Data realisasi APBD 2010-2016, DJPK

No	Variabel	Defenisi operasional	Sumber
		Rasio total belanja pemerintah daerah (agregasi belanja kabupaten kota) terhadap total belanja pemerintah pusat	
3	Log(Modal)	Rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah	Data realisasi APBD 2010-2016, DJPK
4	Log( <i>marketsize</i> )	Ukuran pasar disuatu provinsi diwakili dengan proksi PDRB dibagi populasi penduduk.	BPS
5	Log(listrik)	Data rasio konsumsi listrik per kwh terhadap populasi penduduk	Statistik Ketenagalistrikan 2010-2016
6	Log(Jalan)	Data rasio kerapatan jalan Merupakan rasio total panjang jalan di suatu provinsi (total jalan negara, provinsi dan kabupaten/kota) terhadap luas wilayah provinsi	BPS
7	Log(UMPrill)	Data Upah Minimum Provinsi yang dibagi GDP deflator	BPS
8	Hcap	Data persentase illiterasi dan semi illiterasi provinsi. Diproksikan dengan persentase data penduduk buta huruf berusia 15 keatas	BPS
9	Perinvest	Regulasi investasi di daerah perbandingan jumlah perda investasi di suatu daerah terhadap total Kabupaten/Kota di suatu provinsi.	Peraturan Daerah

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Tahap Pemilihan Model

Hasil pengujian menunjukkan bahwa melalui kriteria *Breusch Pagan* menunjukkan p-value 0,00 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Selanjutnya dilakukan pengujian apakah model *Common effect* lebih baik daripada model *Fixed Effect* menggunakan Uji Chow. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai *Cross Section Chi-square* statistics yaitu sebesar 233.832471 dan nilai probabilitas *Cross Section Chi-square* sebesar 0,0000 (tolak H<sub>0</sub>) atau dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Sehingga perlu diuji kembali untuk menentukan model melalui Uji Hausman. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai *Chi-square* statistics sebesar 21.879857 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0051 (tolak H<sub>0</sub>) atau dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Model*. Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Pemilihan Model Terbaik  
Sumber: data diolah, 2018

Uji	<i>p-value</i>	Hasil	Keterangan
<i>LM-test</i>	0,000	H <sub>0</sub> Ditolak	Random Effect Model
<i>Chow</i>	0,000	H <sub>0</sub> Ditolak	Model <i>fixed effect</i>
<i>Hausman</i>	0,0051	H <sub>0</sub> Ditolak	Model <i>fixed effect</i>

#### 4.2 Uji Asumsi Klasik

Selain melihat kriteria statistik sebagai evaluasi hasil analisis regresi, terdapat pula kriteria regresi ekonometrik yang harus diperhatikan yaitu menyangkut pelanggaran asumsi klasik. Terdapat tiga masalah utama yang sering muncul yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya asumsi dasar, yaitu yang disebut dengan asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased estimator*). Dalam penelitian ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorealitas, dan uji heteroskedastisitas apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik atau tidak.

Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji normalitas untuk melihat apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengujian normalitas didapatkan nilai *probability Jarque bera* sebesar 0,289209 artinya lebih besar dari P value 0,05 sehingga tolak H<sub>0</sub> artinya data terdistribusi normal.

Selanjutnya, dilakukan pengujian untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model dilihat dari koefisien korelasi antar variabel bebasnya, apabila terdapat korelasi yang tinggi (diatas nilai koefisien determinasi) maka dalam model tersebut terdapat multikolinearitas. Adanya multikolinieritas menyebabkan nilai dari koefisien-koefisien regresi tidak dapat ditaksir, sehingga dapat menyesatkan interpretasi (*misleading*) dan nilai standar *error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga sehingga tingkat signifikansi variabel bebasnya buruk. Pada pengujian multikolinearitas ini digunakan uji *Variance Inflation Factors*. Pada pengujian VIF, nilai centered VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sehingga tidak dimungkinkan terjadi autokorelasi yang biasa terjadi pada data time series sehingga peneliti tidak melakukan pengujian autokorelasi. Selanjutnya, untuk pengujian heteroskedastisitas pada model ini menggunakan uji *white*. Pada uji regresi *Ordinary Least squares*, terdapat heteroskedastisitas pada model dimana *probability Chi-Square* sebesar 0,0000 artinya lebih kecil dari 0,05. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghilangkan gejala heteroskedastisitas dengan metode *Weighted Least Squares* (pembobotan). Langkah awal dalam metode WLS adalah menentukan pembobot yaitu dengan melihat pola yang ditunjukkan sisaan terhadap variabel bebas. Pada penelitian pembobotan yang digunakan adalah  $1/\sqrt{x_i}$ . Setelah dilakukan pembobotan maka nilai Prob.Chi-Squarenya menjadi 0,2481 dan dapat disimpulkan bahwa dengan metode WLS sudah tidak terdapat lagi masalah heteroskedastisitas pada model ini.

### 4.3 Analisis Regresi

Analisa regresi bertujuan untuk mengetahui secara parsial maupun simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui proporsi variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Hasil Output regresi menggunakan *Fixed Effect Model*  
Sumber: data diolah, 2018

Variabel	Expected	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
<b>C</b>		-42.05714	-3.145936	0.0019
<b>LOG(FDEC)</b>	+	-0.380768	-1.687139	0.0933*
<b>LOG(MODAL)</b>	+	0.161040	0.427746	0.6693
<b>LOG(LISTRİK)</b>	+	0.435134	1.793722	0.0745*
<b>LOG(JALAN)</b>	+	1.067047	1.887302	0.0607*
<b>LOG(HCAP)</b>	-	0.144417	0.535649	0.5928
<b>PERINVEST</b>	+	2.849596	2.860053	0.0047***
<b>LOG(MARKETSIZE)</b>	+	2.292843	2.616772	0.0096***
<b>LOG(UMPRIL)</b>	-	-0.278387	-0.477578	0.6335
<b>Adjusted R-squared</b>	0.679633			
<b>Fstatistic</b>	13.13016			
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000			

\*\*\*) Signifikansi pada  $\alpha = 1\%$ , \*\*) Signifikansi pada  $\alpha = 5\%$ , \*) Signifikansi pada  $\alpha = 10\%$

Pada hasil regresi diatas diketahui nilai signifikansi dalam uji F sebesar 0,00 lebih kecil dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model secara simultan berpengaruh terhadap investasi. Sementara untuk melihat berapa persen pengaruh variabel bebas tersebut dapat mengacu pada nilai Adj. R square. Pada penelitian ini didapatkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,6796 atau 67,96% variabel pada penelitian ini dapat menjelaskan model sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar regresi.

Dari model estimasi tersebut dapat ditunjukkan bahwa nilai konstanta atau koefisien intersep sebesar -42.05714 yang artinya bahwa rata rata perbedaan nilai investasi yang masuk apabila tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas adalah sebesar -42.05714. Selanjutnya, variabel utama yang diuji pada penelitian ini yaitu variabel desentralisasi fiskal (Fdec) berpengaruh signifikan dengan signifikansi pada derajat kesalahan 10% terhadap variabel independen yaitu nilai Investasi, variabel Fdec (desentralisasi fiskal) menunjukkan arah koefisien negatif sebesar -0,380768 dan signifikan pada  $\alpha = 10\%$  yang berarti bahwa setiap kenaikan share belanja pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat sebesar 1% maka akan menurunkan arus investasi sebesar 0,42% dalam suatu provinsi.

Tanda koefisien negatif bertolak belakang dengan hipotesis awal penelitian ini dimana seharusnya otoritas penuh pemerintah daerah terhadap belanja daerah dapat

memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur anggaran belanja sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. Proksi desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan share total belanja daerah terhadap total belanja pemerintah pusat karena mengingat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan desentralisasi dari sisi belanja (*expenditure side*). Dengan menggunakan desentralisasi dari sisi belanja menimbulkan beberapa konsekuensi seperti tidak adanya keharusan bagi pemerintah daerah untuk memacu penerimaan di daerah sehingga berakibat kesenjangan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah harus ditutupi oleh pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah yang menimbulkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Hasil tanda arah negatif yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas belanja pemerintah daerah belum optimal dan menjadi disinsentif bagi masuknya investasi pada daerah tersebut. Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masih terbatas pada belanja operasional dan belanja pegawai sementara belanja modal yang seharusnya menjadi investasi pemerintah daerah sendiri persentasenya tidak terlalu besar. Pada data realisasi APBD yang digunakan pada penelitian ini rata-rata penggunaan anggaran belanja untuk belanja modal baru sekitar 23,62% setiap tahunnya. Hasil tanda koefisien yang sama juga didapatkan pada penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Kalomova (2009) yang mengungkapkan bahwa tingkat desentralisasi di negara penerima investasi memiliki dampak negatif terhadap FDI.

Variabel selanjutnya adalah variabel modal yang merupakan rasio belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah daerah. Pada hasil regresi didapatkan koefisien belanja modal sebesar 0.161040 namun tidak signifikan dalam menarik investasi di daerah. Setiap belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah belum mampu untuk menaikkan nilai investasi di provinsi tersebut. Penyebab belum signifikannya belanja modal dalam menarik investasi dapat disebabkan oleh kualitas belanja pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah baru sebesar 23,62% per tahun. Seharusnya belanja modal dalam APBD dapat mendorong daerah tersebut untuk membangun infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusianya. karena calon investor akan menilai kelayakan suatu daerah tersebut terkait dengan sarana pendukung untuk penanaman modal.

Selanjutnya, dari variabel kontrol infrastruktur dari dua variabel yang diuji yaitu konsumsi listrik per kapita serta densitas jalan provinsi. Variabel listrik memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki koefisien positif sebesar 0.435134 yang berarti bahwa setiap kenaikan konsumsi listrik per kapita sebesar 1% akan menaikkan investasi sebesar 0,435134%. Apabila dibandingkan di tiap daerah maka semakin tinggi konsumsi listrik akan menyiratkan besarnya pasokan listrik terhadap suatu daerah. Hal ini dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut karena ketersediaan listrik merupakan salah satu prasyarat utama beroperasinya suatu industri dan usaha lainnya. Sementara itu variabel jalan memiliki pengaruh positif terhadap investasi dengan koefisien sebesar 1.067047 yang berarti setiap kenaikan densitas jalan maka akan menaikkan nilai investasi sebesar 1.067047%.

Variabel Upah Minimum provinsi yang digunakan sebagai variabel kontrol pada penelitian memiliki koefisien negatif sebesar -0.278387 namun tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara teori, upah minimum merupakan suatu disinsentif bagi investasi. Motivasi bagi penanaman modal adalah mencari biaya produksi yang lebih rendah dengan mengutilisasi produksi berbiaya rendah di negara tujuan investasi (host country) (Cushman, 1987) sehingga apabila UMP yang ditetapkan semakin tinggi setiap tahunnya akan menjadi disinsentif bagi investasi untuk masuk.

Pada makalah acuan utama He Canfei (2006) juga mengemukakan bahwa variabel upah berkorelasi negatif dengan investasi sementara pengaruh upah yang tidak signifikan juga ditemukan pada penelitian Chen (1996) and Broadman & Sun (1997). Pada kedua penelitian tersebut yang mengambil penelitian di China menyatakan bahwa upah buruh di China yang sejak awal lebih murah dari negara tetangga menjadi salah satu sebab kenapa variabel upah tidak signifikan.

Variabel selanjutnya adalah variabel sumber daya manusia (Hcap). Sumber daya manusia terkait kualitas dari tenaga kerja di suatu daerah yang diwakili dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dipercaya dapat meningkatkan kualitas dari pekerja (Zhang, 2001) sehingga dapat menarik investasi. Pada beberapa penelitian menggunakan proksi tingkat *illiteracy* atau tingkat buta huruf karena mengindikasikan bahwa level buta huruf yang rendah mengindikasikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti pada penelitian Coughlin dan Segev tahun 2000.

Variabel pengendali selanjutnya adalah variabel ukuran pasar (*market size*). Hipotesis ukuran pasar, diusulkan pertama kali oleh Balassa (1966) yang kemudian dikembangkan oleh Scaperlanda & Mauer (1969) yang mendukung gagasan bahwa "pasar yang besar diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien dan eksploitasi skala ekonomi: sebagai ukuran pasar berkembang pada beberapa nilai kritis dimana investasi asing langsung akan mulai meningkat setelah adanya ekspansi lebih lanjut (Chakrabarti, 2001). Pada penelitian ini variabel ukuran pasar menggunakan proksi rasio PDRB per kapita yaitu PDRB dibagi dengan jumlah populasi. Proksi ini digunakan karena PDRB sebagai salah satu indikator kemajuan ekonomi dimana semakin besar PDRB dan penduduk suatu wilayah mengindikasikan semakin besar ukuran pasar di provinsi tersebut.

Berdasarkan teori Dunning (2001) dimana adanya *locational advantages* yaitu keuntungan lokasi dari *host country* FDI menjadi salah satu penentu keputusan investor untuk menanamkan modalnya. Keuntungan ini dapat berupa ketersediaan sumber daya alam, faktor tenaga kerja, keadaan sosial politik seperti ukuran pasar. (Petrovic-Randelovic, 2017). Salah satu motivasi investor untuk menanamkan modal di suatu daerah adalah adanya suatu peluang untuk memasarkan produk yang telah dibuat di negara host country. Pada hasil regresi dengan model FEM didapatkan hasil variabel ukuran pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dengan koefisien sebesar 2.292843 yang artinya setiap kenaikan ukuran pasar sebesar 1% akan meningkatkan nilai investasi sebesar 2.292843%. Hasil yang sama juga ditemui pada penelitian Petrovic-Randelovic et al., 2017 yang menyatakan variabel GDP dan populasi berkorelasi positif dengan FDI.

Variabel terakhir adalah variabel Perinvest yaitu perbandingan jumlah perda insentif penanaman modal yang dimiliki oleh suatu provinsi yang meliputi perda kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa

keberadaan perda insentif investasi memiliki tanda koefisien positif sebesar 2.849596 dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% yang artinya setiap kenaikan jumlah perda disuatu provinsi sebesar 1% akan meningkatkan nilai investasi sebesar 2.849596 %.

Adanya otonomi daerah telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi. Menurut KPPOD, faktor-faktor yang mampu menarik investasi masuk ke suatu daerah adalah faktor kelembagaan, sosial politik, kondisi ekonomi daerah, kondisi sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur penunjang (KPPOD,2003).

Terdapat beberapa hal lain diluar upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi yang menjadikan suatu provinsi berbeda penerimaan investasinya dengan provinsi lain. Faktor lokasi dan infastruktur menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi. Lokasi Jawa Barat yang strategis sebagai provinsi penyangga DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadikan wilayah kabupaten Kota seperti Bekasi, Bogor dan Karawang menjadi penerima investasi terbesar di Jawa Barat. Selain itu Jabar merupakan provinsi yang memiliki jumlah dan luas kawasan industri yang paling besar di Indonesia, yaitu dengan 23 buah kawasan industri dengan luas kurang lebih 11.881 Ha (39,55 % dari luas seluruh kawasan industri di Indonesia) sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat karena banyaknya kemudahan yang didapat jika berinvestasi di kawasan industri (Lakip DPMPSTP Jabar, 2016). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana pemerintah mendorong para produsen untuk membangun pabrik dalam kawasan industri yang tersedia.

## 5. KESIMPULAN

Dengan adanya desentralisasi setiap pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan setiap kebijakan guna menarik investasi di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap arus masuk investasi di Indonesia. keberadaan desentralisasi dinilai memberikan disinsentif untuk menarik investasi di daerah. Adanya berbagai peraturan daerah yang ditetapkan daerah dinilai sebagai salah satu penyebab disinsentif tersebut. Instrumen belanja modal yang diharapkan mampu membangun infastruktur di daerah sebagai upaya pemerintah daerah dalam menarik investasi belum signifikan dalam mempengaruhi investasi yang masuk ke daerah. Belum besarnya rasio belanja modal dalam struktur APBD pemerintah daerah dinilai menjadi penyebab belum signifikannya belanja modal dalam menarik investasi. Keberadaan perda insentif investasi yang baru diterapkan pada beberapa daerah memiliki hasil yang signifikan dalam menarik investasi di daerah tersebut. Variabel kontrol lain yang mempengaruhi arus masuk investasi di Indonesia adalah variabel konsumsi listrik dan panjang jalan serta market size yang dinilai sebagai peluang bagi investor dalam menanamkan modal di daerah.

Faktor lain yang belum tercakup dalam model penelitian ini adalah faktor keberadaan kawasan industri yang memiliki peranan besar dalam menarik investasi. Dengan adanya fasilitas sarana dan prasana serta infastruktur yang telah tersedia di kawasan industri baik yang dibangun pemerintah maupun swasta menjadi salah satu penarik investor untuk menanamkan modal karena kawasan industri yang menawarkan beberapa kemudahan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi atas hasil/temuan dari suatu penelitian. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dapat dijadikan digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan terkait desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam pelaksanaan desentralisasi selanjutnya diharapkan pemerintah pusat dapat membuat aturan kebijakan guna memperbaiki kualitas belanja pemerintah daerah agar dapat mendorong lebih besarnya proporsi belanja modal dalam APBD. selanjutnya, dalam upaya memperbaiki iklim berusaha yang dilakukan pemerintah pusat seharusnya dapat diikuti oleh pemerintah daerah mengingat pada akhirnya investasi yang ditanamkan justru sebagian besar berada di daerah. Penegakan kebijakan ini juga harus diikuti dengan dukungan infastruktur dan kualitas SDM pemerintah daerah yang lebih baik. Pemberian insentif fiskal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki berdampak positif bagi sebagian provinsi di Indonesia sehingga perlu didorong provinsi lain yang tidak memiliki perda tersebut untuk menetapkan perda yang serupa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Raksaka Mahi. (2017). Pinjaman Daerah Untuk pembangunan Infrastruktur. Bahan kuliah. MPKP FEB Universitas Indonesia.
- BKPM. (2017). Update Iklim Investasi Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Briefing bersama Kemenlu.
- BKPM. (2017). *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter I*.
- Broadman, H. & Sun, X. (1997). *The Distribution of Foreign Direct Investment in China. The World Economy*, 20, 3, 1997, pp. 339-361.
- Carkovic, M. V., and Levine, R. (2002). *Does foreign direct investment accelerate economic growth? University of Minnesota Department of Finance Working Paper*. Available at <http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf>,
- Chen, C. (1996). *Regional Determinants of Foreign Direct Investment in Mainland China, Journal of Economic Studies*, 23, 1, 1996, pp. 18-30.
- Coughlin, C. C., & Segev, E. (2000). *Foreign direct investment in China: A Spatial Econometric Study. World Economy*, 23(1), 1-23.
- Cushman, D.O. (1987), "The effects of real wages and labor productivity on foreign direct investment", *Southern Economic Journal*, Vol. 54, July, pp. 174-85.
- Dartanto dan Brojonegoro, (2003). Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol.4 No.1.
- HE Canfei (2006). *Regional Decentralisation and Location of Foreign Direct Investment in China. Post-Communist Economies. Volume 18, Issue 1, March 2006, Pages 33-50*.
- He, Q dan Sun M (2014). *Does Fiscal Decentralization Promote the Inflow of FDI in China? Economic Modelling Elsevier*. 43, 361-317.
- Kalamova, Margarita. (2009). "Foreign Direct Investment and Decentralization." *Organisation for Economic Co-operation and Development*
- KPPOD. (2014). Evaluasi Perda Pungutan di Era UU No.28 Tahun 2009. Jakarta
- (2015). Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha: Evaluasi pelaksanaan rencana aksi perbaikan berusaha di daerah. Jakarta

- Mankiw, N Gregory. (2007). *Makroekonomi*: edisi Keenam (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Petrović-Ranđelović, Marija & jankovic-milic, Vesna & Kostadinovic, Ivana. (2017). *Market Size as a Determinant of The Foreign Direct Investment Inflows in The Western Balkans Countries*. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization. 10.22190/FUEO1702093P.
- Rondinelli, D. A. (1981). *Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries*. *International review of administrative sciences*, 47(2), 133-145.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic development* (8th ed.). Boston : Addison Wesley.
- Wang, Y. (2013). *Fiscal decentralization, endogenous policies, and foreign direct investment: Theory and evidence from China and India*. *Journal of Development Economics*, 103, 107-123.
- World economic forum. (2016). *Executive opinion survey 2016*.  
[http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017\\_FINAL.pdf](http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf)
- Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). *Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China*. *Journal of public economics*, 67(2), 221-240.  
<https://www.jawapos.com/read/2017/07/21/145703/indonesia-semakin-layak-investasi-ini-penjelasan-nya> edisi 21 Juli 2017. Diakses pada 20 April 2018  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/12/02/095053626/Persoalan.Utamanya.Realitasasi.Investasi>. Diakses pada 24 April 2018

**LAMPIRAN****Hasil regresi 3 model**

Sumber: data diolah, 2018

<b>Variabel</b>	<b>CEM</b>	<b>FEM</b>	<b>REM</b>
LOG(FDEC)	-0.522704***	-0.380768*	-0.292676
LOG(MODAL)	0.897603**	0.161040	0.444117
LOG(LISTRIK)	0.605791***	0.435134*	0.471598**
LOG(JALAN)	-0.495460***	1.067047*	-0.270415
LOG(HCAP)	0.139149	0.144417	0.063282
PERINVEST	0.571681	2.849596***	1.958472**
LOG(MARKETSIZE)	-0.101355	2.292843***	0.354996
LOG(UMPRIIL)	1.171540***	-0.278387	0.960300**
C	-15.79571	-42.05714	-21.22993
Adjusted R Square	<b>0.221273</b>	<b>0.679633</b>	<b>0.219999</b>

\*\*\*) Signifikansi pada  $\alpha= 1\%$ , \*\*) Signifikansi pada  $\alpha= 5\%$ , \*) Signifikansi pada  $\alpha= 10\%$